

## **BAB II**

### **PEMBERLAKUAN ASAS TUNGGAL PANCASILA DI INDONESIA PADA ORDE BARU**

#### **A. Keadaan Sosial Politik Pada Akhir Pemerintahan Orde Lama**

##### **1. Pemberlakuan Demokrasi Terpimpin**

Masa-masa akhir pemerintahan Soekarno yang lebih dikenal dengan sebutan Orde Lama dimulai sejak Soekarno memberlakukan sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin untuk menggantikan sistem pemerintahan sebelumnya yakni Demokrasi Parlementer.

Demokrasi Terpimpin mulai berlaku setelah Soekarno mengeluarkan dekrit presiden pada 5 Juli 1959. Langkah tegas ini diambil oleh Soekarno atas desakan Staf Angkatan Darat, Jenderal A.H Nasution. Soekarno membubarkan Konstituante dan mengeluarkan dekrit untuk kembali ke UUD 1945 dan menjadikannya sebagai satu-satunya konstitusi legal Republik Indonesia. Ia mendeskripsikan bahwa tiga tahun perdebatan dalam konstituante telah gagal menyelesaikan masalah-masalah ideologis, politis dan konstitusional yang mendesak, belum lagi harus membuat undang-undang baru.

Dengan dikeluarkannya dekrit itu semua pimpinan pemerintahan dan angkatan bersenjata diserahkan kepada presiden Soekarno. Begitu juga pimpinan rakyat serta organisasi massa secara formal langsung diserahkan kepada presiden Soekarno dan secara langsung ia menjadi pimpinan semua

itu. dengan demikian kekuasaan semakin berpusat di istana negara. Fungsi departemen semakin berkurang, khususnya departemen pertahanan keamanan. Otonomi presiden semakin besar, bahkan menjadi ukuran politik pada masa itu, sedang kekuatan politik menjadi lumpuh tidak berdaya, suhu politik menjadi kropos termakan oleh budaya otoriter demokrasi terpimpinnya presiden Soekarno.

## 2. Kebijakan pada Demokrasi Terpimpin

Setelah pengumuman dekrit presiden, Soekarno mengumumkan kabinetnya yang baru, menggantikan Kabinet Djuanda yang mengembalikan mandat pada 6 Juli. Kabinet baru dibawah payung UUD 1945 ini diberi nama Kabinet Kerja. Kabinet inilah yang bertugas melaksanakan gagasan Soekarno dalam bentuk Demokrasi Terpimpin.<sup>1</sup>

Adapun program Kabinet Kerja antara lain yaitu *pertama*, memperlengkapi sandang pangan, *kedua*, menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara dan *ketiga*, melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan politik. Tanggal 9 Juli terbentuklah Kabinet Kerja 1 (10 Juli 1959 – 18 Februari 1960). Kabinet ini bersifat presidential, sebab dibentuk dan bekerja berdasarkan UUD 1945. Presiden menjabat sebagai

---

<sup>1</sup>Ahmad Syafii Ma'arif, *Islam dan Politik; Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 45.

Perdan Menteri. Ir. Djuanda sebagai Menteri Pertama dan Dr. J Leimena sebagai wakil menteri pertama. Kabinet Kerja ini berganti hingga tiga kali.<sup>2</sup>

Tindakan Soekarno semakin meluas, antara lain MPR hasil Pemilu 1955 yang anggota-anggotanya adalah pilihan rakyat dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk MPRS yang diatur oleh presiden sendiri. Sejalan dengan itu dibentuk pula Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Soekarno sendiri yang diatur oleh Penpres No : 3 Tahun 1959.

Akhir pidato kenegaraan 17 Agustus 1959 yang berjudul penemuan kembali revolusi kita, oleh DPAS ditetapkan sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan untuk membangun sistem multi partai maka dikeluarkanlah penetapan presiden atau Penpres No. 7 Tahun 1959, tentang penyederhanaan kepartaian, antara lain Masyumi dan PSI terkena Penpres ini. Kemudian DPR hasil pilihan rakyat dibubarkan dan diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) yang diatur melalui Penpres No. 4 Tahun 1960. Selanjutnya diselenggarakan kongres Pemuda Indonesia di Bandung pada bulan Februari tahun 1960 yang kemudian isinya dikenal dengan USDEK (Undang-undang 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia). Dan kemudian oleh DPAS dijadikan Manipol USDEK.

---

<sup>2</sup>P.K Poerwantana, *Partai Politik Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 63.

DPR-GR yang seluruh anggotanya ditunju oleh Soekarno itu, peraturan-peraturan tata tertibnya juga ditetapkan oleh presiden dengan Penpres No. 24 tahun 1960 dan Penpres No. 32 Tahun 1964. Pidato presiden pada upacara pelantikan DPR-GR tanggal 25 Juni 1960 menyebutkan bahwa tugas DPR-GR adalah melaksanakan Manipol, merealisasikan Amanat Penderitaan Rakyat dan melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Dalam upacara pelantikan wakil-wakil ketua DPR-GR pada tanggal 5 Januari 1961, Soekarno menjelaskan lagi kedudukan DPR-GR, yaitu bahwa DPR-GR adalah pembantu presiden/mandataris MPRS dan memberi sumbangan tenaga kepada presiden untuk melaksanakan segala sesuatu yang ditetapkan oleh MPRS.<sup>3</sup>

Hal lain yang dilakukan Soekarno pada demokrasi terpimpin yaitu mulai memberi penekanan pada tema yang sudah terlihat dalam tulisan-tulisannya pada tahun 1926, yang menghendaki persatuan antara nasionalisme, Islam dan marxisme. Tema itu sekarang dinamakan doktrin Nasakom (dari Nasionalisme, Agama, Komunisme). Tampaknya doktrin ini mengandung arti bahwa PNI (Nasionalisme), NU (Islam), dan PKI (untuk Komunisme) akan sama-sama berperan dalam pemerintahan disegala

---

<sup>3</sup>Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 313.

tingkatan, sehingga menghasilkan suatu sistem yang antara lain akan didasarkan pada koalisi kekuatan-kekuatan politik yang berpusat di Jawa.<sup>4</sup>

### 3. Nasakom dan PKI

Ajaran Nasakom sangat menguntungkan PKI karena menempatkannya sebagai unsur yang sah dalam pergerakan nasional dan dalam konstelasi politik Indonesia. Dengan demikian kedudukan PKI semakin kuat dan respektabilitasnya sebagai kekuatan politik sangat meningkat.

Usaha-usaha Soekarno untuk membentuk kabinet Gotong Royong pada tahun 1960 mendapat tantangan dari golongan Agama dan pimpinan TNI-AD, namun Soekarno memberi angin kepada PKI dengan memberikan mereka kedudukan dalam DPR-GR dan DPA serta dalam kepengurusan yang lain. Melihat kenyataan itu pimpinan TNI-AD berusaha untuk mengimbangnya dengan mengajukan calon-calon yang lain, sehingga merupakan cheking terhadap PKI dalam komposisinya. Tetapi daya upaya TNI-AD tersebut menemui kesulitan karena Soekarno memberikan dukungannya yang besar kepada PKI dalam segala hal.

Ketegangan politik terjadi terus menerus antara PKI yang didukung Soekarno dan TNI-AD yang mendapat dukungan dari golongan agama. Terjadi saling lontar fitnah dan tuduhan antara satu sama lain hingga ketegangan antara kedua kubu ini meletus pada 30 September 1965 yang

---

<sup>4</sup>M.C Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Terj. Tim Penerjemah Serambi (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008), 556.

dikenal dengan peristiwa G 30 S/PKI, yaitu sebuah peristiwa percobaan kudeta yang melibatkan PKI dalam usaha menggulingkan pemerintah.

Ambisi besar PKI itulah yang menjadi bumerang tidak saja bagi PKI melainkan juga akhirnya bagi Soekarno. Setelah kudeta PKI yang gagal di penghujung September 1965, maka kekuasaan dengan cepat bergeser kearah terbentuknya peta baru. Orde Baru lahir.<sup>5</sup>

## **B. Lahirnya Orde Baru**

Gagalnya percobaan kudeta G 30 S/ PKI dan jatuhnya kekuasaan Soekarno menandai bangkitnya sebuah era baru yang oleh pendukungnya disebut Orde Baru. Kelahirannya ditandai oleh pemberian mandat yang dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 atau Supersemar oleh Soekarno kepada Soeharto untuk mengatasi situasi yang diakibatkan oleh timbulnya pemberontakan kaum komunis tersebut.

Lahirnya Orde Baru antara lain didukung oleh kekuatan-kekuatan progresif seperti KAP Gestapu/PKI (Kesatuan Aksi Penggayaan Gerakan Tiga Puluh September/PKI), KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) dan TNI (Tentara Nasional Indonesia). Umat Islam, yang mempunyai andil besar dalam aksi-aksi

---

<sup>5</sup>Eep Syaifullah Fatah, *Penghianatan Demokrasi ala Orde Baru; Masalah dan Masa Depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional* (Bandung: Rosdakarya, 2000), 19.

penumpasan dan penggayangan G 30 S/PKI, juga menempati posisi sangat penting dan strategis sebagai eksponen utama kekuatan progresif Orde Baru.<sup>6</sup>

Panglima kostrad, letnan Jenderal Soeharto, muncul sebagai perwira paling senior dalam penumpasan percobaan kudeta tersebut. Soeharto menghadapi menegakkan masalah legitimasi ketika kekuasaan sedikit demi sedikit diambil alih dari Soekarno pada akhir 1965 dan awal 1966. Keharusan Soeharto adalah untuk meyakinkan bahwa rezim baru ini adalah pewaris yang sah dan konstitusional dari presiden pertama. Dari khazanah ideologis Soekarno, pemerintah baru ini mengambil Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara dan karena itu merupakan resep yang paling tepat untuk meligitimasi kekuasaannya.

Pemerintah Orde Baru terus menerus memapankan kekuasaannya diatas panggung politik Indonesia. Orde Baru membedakan dirinya sendiri dari Orde Lama dengan mendefinisikan diri sebagai:

1. Sebuah tatanan negara dan bangsa yang didasarkan atas pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsisten.
2. Sebuah tatanan yang berusaha mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila.
3. Sebuah tatanan yang bercita-cita membangun sistem negara dan masyarakat berdasarkan UUD, demokrasi dan hukum.
4. Sebuah tatanan hukum dan tatanan pembangunan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Faisal Ismail, *Pijar-Pijar Islam; Pergumulan Kultur dan Struktur* (Yogyakarta: LESFI Yogya, 2002), 50.

Sementara mengidentifikasi dirinya dengan empat karakteristik tersebut, Orde Baru mencela Orde Lama menyimpang dari semangat Pancasila dan UUD 1945, misalnya karena menerapkan Demokrasi Terpimpin dan Nasakom, serta mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Orde Baru memberikan prioritas nasional terhadap pelaksanaan pembangunan dan modernisasi, khususnya dalam kehidupan ekonomi dan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Meski menghadapi masalah-masalah ekonomi dan stabilitas politis dan keamanan ketika itu, Orde Baru juga harus menyelesaikan masalah legitimasi ideologisnya. Pada tahun 1966 dan 1967, dasar-dasar dari suatu pemerintah yang dilegitimasi oleh ideologi Pancasila. MPRS mengeluarkan sebuah keputusan pada tanggal 5 Juli 1966 yang mengesahkan pengambilalihan kekuasaan oleh Soeharto dan menjelaskan “penyelewengan-penyelewengan” dalam pelaksanaan Pancasila dan kontisusi yang telah terjadi selama Orde Lama dibawah Soekarno. Ketetapan MPRS No. XX/ MPRS/ 1966 menyatakan bahwa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto didasarkan pada Undang-Undang Dasar dan Pancasila dan akan melaksanakan tujuan-tujuan revolusi. Ketetapan ini dengan tegas mengakui keabsahan, legalitas, dan semangat revolusioner UUD dan Pancasila

---

<sup>7</sup>Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama* (Yogyakarta: Tiara Wanana Yogya, 1999), 107-108.

walau, demikian disebutkan, semua itu tidak dilaksanakan dengan benar dan tepat oleh Soekarno.<sup>8</sup>

Pengukuhan Soeharto menjadi presiden penuh oleh MPRS pada bulan Maret 1968 dapat dipakai sebagai sebuah ukuran bahwa kaki Orde Baru sudah tertanam kuat. Sungguhpun begitu, Soeharto yang menjadi pemimpin Orde Baru dihadapkan pada sebuah persoalan penting tentang format politik macam apa yang seharusnya atau sebaiknya ia tumbuhkan dan kembangkan sehingga dapat menjadi sebuah mekanisme yang dapat diandalkan untuk keperluan membangun Indonesia kembali. Di satu pihak, format politik baru itu harus mampu memberikan semacam kepuasan kepada pendukung-pendukung Orde Baru yang beraneka ragam, sedangkan di pihak lain ia harus pula mampu menghindarkan dirinya dari kesulitan-kesulitan politik yang pernah berjangkit dalam masyarakat di masa-masa yang sudah.<sup>9</sup>

Orde Baru menerapkan apa yang disebutnya dengan “Demokrasi Pancasila”, yang didefinisikan sebagai sistem demokrasi berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk mencapai kesejahteraan sosial. Lebih dari itu, Demokrasi Pancasila mengandung rasa keagamaan yang menolak atheisme, memegang erat kebenaran dan cinta yang dituntun oleh perilaku moral yang

---

<sup>8</sup>Ramage, *Percaturan Politik Di Indonesia; Demokrasi, Islam dan Ideologi Toleransi*, Terj. Hartono Hadikusumo (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002), 43-44.

<sup>9</sup>Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1992), 46

mulia, serta membawa kepada keharmonisan antar individu dan dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila secara total, Soeharto mengambil kebijakan untuk memfokuskan pada pemurnian Pancasila dan meletakkannya sebagai pilar ideologis rezim. Pancasila kini sepenuhnya menjadi suatu pembenaran ideologis untuk kelompok yang berkuasa, tidak lagi hanya merupakan suatu platform bersama dimana semua ideologi bisa dipertemukan. Orde Baru mengklaim dirinya sebagai suatu orde atau tatanan pemerintahan yang tampil sebagai kekuatan pengoreksi total terhadap rezim Orde Lama dan hendak melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.

### **C. Pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila**

#### **1. Fusi partai**

Dalam mekanisme politik Demokrasi Pancasila, keputusan-keputusan harus dibuat melalui musyawarah antara wakil-wakil rakyat, yang tujuan akhirnya adalah mencari mufakat. Dalam Demokrasi Pancasila Indonesia, tidak ada partai oposisi dalam arti sepenuhnya dan nyata seperti yang ada dalam demokrasi liberal Barat. Demikian juga *voting* untuk memenangkan suara mayoritas tidak diperkenankan. *Voting* dilaksanakan hanya jika mufakat tidak dapat dicapai.

Perkembangan berikutnya pada era Orde Baru, tahun 1973 pemerintah mengambil kebijakan penyederhanaan partai. Dimata banyak perwira

---

<sup>10</sup>Ibid., 110.

Angkatan Darat, sistem banyak partai merupakan faktor penghambat tercapainya konsensus nasional tentang dasar serta tujuan negara. Partai-partai hanya melakukan oposisi demi kepentingannya dan kurang memperhatikan program-program pembangunan. Karenanya, kebijakan penyederhanaan partai merupakan alat yang efektif untuk mengontrol partai dan memusatkan kekuasaan ditangan penguasa.<sup>11</sup>

Pengalaman traumatis atas kegagalan partai-partai politik era Demokrasi Parlementer adalah sebagian sumber cara pandang perlunya penyederhanaan partai. Partai, para politisi sipil, dan ideologi yang dianut oleh partai-partai, dinilai tidak memberikan kontribusi apapun dalam upaya menciptakan integrasi, stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya partai-partai dianggap sebagai sumber konflik dan factor destabilisasi politik yang lebih memikirkan kepentingan kelompok dan golongan masing-masing ketimbang kepentingan bangsa. Jumlah partai dan ideologi yang dianutnya dianggap identik dengan jumlah konflik yang dihasilkan. Karena itu jumlah partai dan ideologi harus disederhanakan.<sup>12</sup>

Penerapan kebijakan tersebut menghasilkan pembentukan PPP, PDI dan Golkar. PPP yang formalnya didirikan pada tanggal 5 Januari 1973, merupakan fusi dari empat partai Islam yakni NU, PSII, Perti dan Parmusi.

---

<sup>11</sup>Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam; Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 278-279

<sup>12</sup>Syamsudin Haris, *Menggugat Politik Orde Baru* (Jakarta: Anem Kosong Anem, 1998), 3-4.

Sedangkan PDI yang formalnya didirikan pada 10 Januari 1973 merupakan penggabungan dari PNI, Parkindo, Partai Katholik, IPKI dan Partai Murba.

Setelah kedua partai tersebut terbentuk, pada tahun 1974 pemerintah mengajukan RUU tentang partai politik dan Golongan Karya yang isinya hanyalah melegitimasi keadaan yang telah ada. Didalam RUU tersebut tidak disinggung tentang apa yang dimaksud dengan partai politik dan Golongan Karya. Undang-undang tersebut hanya menyebutkan secara definitif bahwa hanya diakui adanya tiga organisasi kekuatan politik yaitu PPP, PDI dan Golkar.<sup>13</sup>

Soeharto sendiri mengatakan pada tahun 1982 bahwa penyederhanaan sistem kepartaian itu dibenarkan karena bangsa Indonesia telah memberikan dukungannya kepada Orde Baru yang pada gilirannya menjanjikan kepada rakyat bahwa pemerintah akan melaksanakan Pancasila dengan benar. Karena itu, demikian Soeharto, perombakan partai dilaksanakan karena rakyat ingin melaksanakan Pancasila, Moertopo menambahkan bahwa konsolidasi tahun 1973 dari sembilan partai politik menjadi dua ditambah Golkar menjadi realisasi struktural atas Demokrasi Pancasila.<sup>14</sup>

## 2. Program P-4

Setelah penyederhanaan partai dilakukan, Soeharto kemudian memandang bahwa penyelewengan-penyelewengan (terutama terhadap

---

<sup>13</sup>Hartono Mardjono, *Politik Indonesia (1996-2003)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 34-35.

<sup>14</sup>Ramage, *Percaturan Politik Di Indonesia*, 52.

UUD 1945 dan Pancasila) yang banyak terjadi pada masa Orde Lama sebenarnya bersumber dari kenyataan tidak diamalkannya Pancasila secara sungguh-sungguh dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melihat kenyataan ini timbullah keinginan dan ide dari pemerintah Orde Baru untuk menjabarkan Pancasila dalam bentuk rumusan P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Dengan diprakarsai oleh presiden Soeharto sendiri, akhirnya P-4 pada tahun 1978 berhasil dirumuskan dan rumusan ini disahkan oleh sidang MPR melalui ketetapan MPR NO.11/1978. P-4 dimaksudkan sebagai penjabaran dari sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Penjabaran Pancasila sebagaimana tercermin dalam P-4 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi seluruh bangsa Indonesia dalam mengamalkan ajaran dan nilai-nilai Pancasila itu dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>15</sup>

Menindaklanjuti pengesahan P-4 oleh MPR pada tahun 1978, sebuah komisi yang dinamakan P7 (Penasehat Presiden Mengenai P-4) yang diketuai Dr. Ruslan Abdulgani, mantan ketua PNI yang menjadi jubiir presiden Soekarno selama periode Orde Lama dibentuk di Jakarta dengan tugas memberikan nasehat kepada presiden mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai P-4. BP 7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksana P-4) juga didirikan di Jakarta untuk mengkoordinasi pelaksanaan program P-4 yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan regional.

---

<sup>15</sup>Ismail, *Pijar-pijar Islam*, 50-51.

Dalam usaha mereka mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan rakyat Indonesia, pemerintah pusat, daerah, dan lokal melaksanakan penataran P-4 secara teratur, yang berlangsung selama dua minggu. Semua pegawai pemerintah dan anggota Angkatan Bersenjata harus ambil bagian dalam penataran ini. Pada setiap permulaan tahun ajaran baru SMP, SMA dan Universitas-Universitas diseluruh negeri baik swasta maupun negeri menyelenggarakan penataran P-4. Semua pelajar diwajibkan memenuhi penataran P-4 dan untuk itu akan mendapatkan sertifikat P-4.<sup>16</sup>

### 3. Pemberlakuan asas tunggal Pancasila

Setelah berhasil dengan kebijakannya dalam merealisasikan dan memasyarakatkan P-4, pemerintah Orde Baru melangkah lebih jauh dengan menempuh kebijakan baru yang lebih signifikan dan lebih strategis dalam rangka untuk menyempurnakan kebijakan yang telah diambil sebelumnya. *Pertama*, pemerintah menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua partai politik dan Golkar. *Kedua*, pemerintah menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi kemasyarakatan.

Banyak faktor yang melatarbelakangi Soeharto memberlakukan asas tunggal Pancasila bagi semua organisasi yang bergerak dalam bidang politik maupun dalam bidang kemasyarakatan. Ada dua faktor yang mendorong pemerintah memberlakukan asas tunggal Pancasila yaitu *pertama*, pemerintah tampaknya belajar dari pengalaman kampanye pemilu

---

<sup>16</sup>Ismail, *Ideologi Hegemoni*, 147.

sebelumnya dimana terjadi pertarungan fisik (yang sering berakibat fatal), khususnya antara pendukung Golkar dan PPP. Soeharto mengakui bahwa telah terjadi ledakan kekerasan selama pelaksanaan pemilu dan hal ini terjadi karena tidak semua kontestan pemilu menerima Pancasila sebagai ideologi untuk ditegakkan oleh seluruh kelompok sosial politik.

Pada waktu itu harian Kompas sebagaimana dikutip oleh Faisal Ismail, melaporkan bahwa telah terjadi bentrokan antara para pendukung PPP dan Golkar diberbagai wilayah, khususnya di Jakarta dan Yogyakarta. Bentrokan paling serius terjadi pada tanggal 18 Mei 1982 di lapangan Banteng Jakarta ketika Golkar sedang mengadakan kampanye. Para pendukung PPP dilaporkan telah menantang Golkar, mengakibatkan kerusuhan yang berakibat ditangkapnya kurang lebih 100 anak muda. Penguasa melarang semua bentuk arak-arakan kampanye dan menko Polkam Soedomo memerintahkan aparat keamanan untuk menembak ditempat setiap pelaku kerusuhan.<sup>17</sup>

*Kedua*, secara ideologis Pancasila akan menempati posisi yang lebih kuat dalam kehidupan sosial dan nasional bangsa Indonesia. Ide ini tampaknya diperkuat oleh fakta, bahwa sepanjang menyangkut Islam politik, PPP masih mempertahankan Islam sebagai asasnya disamping Pancasila. Selain itu motif utama pemberlakuan asas tunggal itu ialah untuk melindungi

---

<sup>17</sup>Ibid., 201.

Pancasila sebagai ideologi nasional dan untuk terus mensosialisasikannya dalam kehidupan bangsa dan bernegara.<sup>18</sup>

Langkah awal usahanya memberlakukan asas tunggal Pancasila yaitu dalam dua pidatonya, satu pada peringatan Hari Kemerdekaan 1982 dan lainnya pada bulan Juli 1983, Soeharto menjelaskan dasar pemikiran pemerintah untuk memaksakan kepatuhan kepada Pancasila. Dalam pidato pertama itu Soeharto memperingatkan adanya ideologi-ideologi alternatif selain Pancasila, yang masih dikemukakan di Indonesia. Karena itu dia menetapkan bahwa semua organisasi sosial politik harus menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Sedangkan dalam pidato yang kedua ia menegaskan dan menjelaskan kembali maksudnya untuk menghancurkan semua organisasi, terutama partai politik, menerima Pancasila sebagai asas tunggal, dalam pidato di depan perwira ABRI senior. Soeharto mengatakan bahwa penerimaan tanpa syarat atas Pancasila adalah penting untuk stabilitas dan kesatuan nasional. Dia mengatakan bahwa walaupun Orde Baru telah didasarkan pada Pancasila selama bertahun-tahun, masih ada orang-orang dan kelompok yang menolak menerima Pancasila atau menganggap Pancasila berbahaya.<sup>19</sup>

Gagasan pemerintah tentang penyatuan asas bagi seluruh partai politik, untuk pertama kali diajukan Soeharto pada pidato kenegaraan didepan

---

<sup>18</sup>Ibid., 197-198.

<sup>19</sup>Ramage, *Percaturan Politik di Indonesia*, 62-63.

sidang DPR 16 Agustus 1982. Kemudian gagasan ini dimasukkan dalam ketetapan MPR No. II/1983 (Pasal 3 bab IV), dengan alasan demi memelihara, memperkuat dan menetapkan Pancasila dalam kehidupan sosial dan nasional bangsa, seluruh partai politik dan Golkar, harus menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal Pancasila. Dengan ketetapan ini, pemerintah menghapus asas khusus dan karakteristik tersendiri yang menjadi landasan PPP dan PDI. Untuk PPP adalah “Islam”, sementara PDI adalah “Demokrasi Indonesia, Nasionalisme Indonesia dan Keadilan Sosial”.<sup>20</sup>

Gagasan asas tunggal Pancasila bagi partai politik dan Golkar yang dicanangkan oleh pemerintah sebagaimana tertuang dalam GBHN 1983 itu menimbulkan teka teki dan silang pendapat dikalangan para pemimpin organisasi kemasyarakatan. Mereka bertanya-tanya apakah kebijakan itu berlaku juga bagi organisasi kemasyarakatan yang dipimpinnya. GBHN 1983 itu sendiri tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa penetapan kebijakan asas tunggal Pancasila itu berlaku juga bagi semua organisasi kemasyarakatan, melainkan hanya menyebutkan bahwa organisasi-organisasi kemasyarakatan akan diatur oleh undang-undang. Kemudian klarifikasi tentang diberikan oleh Menteri Muda Urusan Pemuda dan Olahraga, Abdul Ghafar pada tanggal 30 Agustus 1983 setelah berkonsultasi dengan Soeharto. Ia menegaskan bahwa penerapan kebijakan asas tunggal juga berlaku bagi organisasi kemasyarakatan dan undang-undang untuk ini,

---

<sup>20</sup>Ismail, *Ideologi Hegemoni*, 203.

setelah nantinya mendapat persetujuan dari DPR, akan segera dikeluarkan dan diberlakukan.<sup>21</sup>

Meskipun mendapat berbagai reaksi, pemerintah tetap merealisasikan rencananya untuk menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua partai politik. Pada tanggal 19 Februari 1985 pemerintah dengan persetujuan DPR mengeluarkan undang-undang No. 5/1985, menetapkan bahwa partai-partai politik dan Golkar harus menerima Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Empat bulan kemudian, pada tanggal 17 Juni 1985 pemerintah lagi-lagi atas persetujuan DPR mengeluarkan undang-undang No. 8/1985 tentang ormas, menetapkan bahwa seluruh organisasi sosial atau masyarakat harus mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal Pancasila.

Undang-undang yang diajukan pada tahun 1982 dan resmi diterima pada tahun 1985 menegaskan bahwa semua organisasi sosial harus menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam anggaran dasar mereka. Dan dalam prakteknya, ini berarti bahwa tidak peduli maksud dan tujuan didirikannya organisasi tersebut baik keagamaan atau politik hanya Pancasila yang boleh dipakai sebagai asasnya. Penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal seluruh partai politik dan organisasi masyarakat menjadi syarat mutlak, dan tidak perlu diperdebatkan. Hal ini berarti bahwa penolakan Pancasila sebagai asas tunggal oleh partai politik dan ormas manapun akan mengakibatkan dibekukannya organisasi tersebut oleh pemerintah.

---

<sup>21</sup>Ismail, *Pijar-Pijar Islam*, 93-94.